

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengikuti regulasi pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan salah satu instansi pemerintah satuan kerja di bawah naungan Mahkamah Agung RI, bersama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebagai salah satu Pengadilan Negeri di DKI Jakarta yang telah mematuhi regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerapkan kebijakan untuk mempekerjakan setidaknya 2% pegawai penyandang disabilitas. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah meraih penghargaan langsung dari Menteri Sosial sebagai pengakuan atas komitmennya dalam mendukung integrasi penyandang disabilitas dalam lingkungan kerja.

Implementasi Pengarusutamaan Disabilitas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terlaksana dengan baik, mulai dari sistem perekrutan pegawai penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dengan menunggu arahan dari Mahkamah Agung RI, karena semua CPNS di lingkungan pengadilan harus melalui arahan tersebut. Saat ini, Mahkamah Agung RI belum memberikan persetujuan kepada Pengadilan Negeri di DKI Jakarta untuk merekrut pegawai penyandang disabilitas. Namun demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ingin menunggu lebih lama lagi, sehingga mengambil inisiatif untuk membuka lowongan pekerjaan khusus bagi penyandang disabilitas. Proses ini didukung oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA). Pegawai penyandang disabilitas yang direkrut melalui inisiatif ini tidak masuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan sebagai Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan kontrak kerja berjangka waktu satu tahun. Kontrak tersebut dapat diperpanjang jika kinerja yang ditunjukkan pegawai tersebut dinilai baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sangat peduli terhadap isu penyandang disabilitas. Tidak hanya untuk tamu pengadilan, tetapi juga bagi pegawai penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka mendapatkan hak-hak yang setara dan tidak mengalami diskriminasi. Pengadilan ini menerapkan lingkungan kerja yang ramah terhadap penyandang disabilitas, menjadikannya sebagai contoh inklusi yang sangat baik bagi pegawai dengan disabilitas. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyediakan sarana prasarana yang mendukung untuk memudahkan penyandang disabilitas, termasuk pegawai mereka, guna menciptakan kepuasan dan kenyamanan kerja yang optimal. Sarana tersebut antara lain meliputi lift dengan tombol yang mudah dijangkau bagi kaum rentan, toilet khusus disabilitas, ruang sidang yang dilengkapi untuk disabilitas, pelayanan prioritas untuk disabilitas, serta jalur panduan (guiding block).

Dasar kebijakan sarana prasarana yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Dirjen, Peraturan Mahkamah Agung, serta beberapa pedoman yang relevan. Namun, dalam implementasinya, jika ada regulasi terkait perubahan atau penambahan sarana prasarana, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menunggu setidaknya satu tahun untuk meminta anggaran baru sebelum dapat melaksanakan pengimplementasiannya. Proses ini memastikan bahwa semua perubahan atau penambahan sarana prasarana dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sejauh ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam inklusi, baik untuk tamu pengadilan maupun pegawai penyandang disabilitas. Prestasinya terbukti dengan predikat baik

dalam pelayanan dan kepuasan tamu pengadilan, serta berhasil menjadikan instansi mereka sebagai teladan dalam menerapkan lingkungan kerja yang ramah terhadap disabilitas. Hal ini tercermin dalam upaya mereka untuk terus meningkatkan aksesibilitas fasilitas, memastikan keadilan dalam rekrutmen dan pengembangan karir, serta memberikan perlindungan dan dukungan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

A. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran yang diberikan untuk dapat membantu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menghadapi kendala maupun hal lainnya agar dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan kerja dan membangun citra positif, diantaranya:

1. Perlu adanya penambahan yang proporsional dalam rekrutmen pegawai penyandang disabilitas untuk memberikan peluang lebih luas kepada penyandang disabilitas yang belum atau tidak dapat mengikuti tes CPNS karena berbagai alasan tertentu. Hal ini bertujuan untuk mendorong inklusi dan kesempatan yang setara bagi seluruh individu di masyarakat.
2. Pembangunan lingkungan yang ramah disabilitas, diawali dengan penyusunan Disability Anlysis Pathway. Serta roadmap perencanaan dan manajemen SDM disabilitas
3. Memberikan support pada pegawai disabilitas melalui penyediaan sarana dan prasarana yang akomodatif bagi pegawai disabilitas
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua pegawai tentang Pengarusutamaan Disabilitas (PUD)

Dengan melakukan penelitian yang mendalam dan menerapkan rekomendasi yang dihasilkan, diharapkan kesenjangan antara jumlah kuota yang dialokasikan dan realisasi keterisian PNS penyandang disabilitas dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya akan memenuhi kuota yang telah ditetapkan, tetapi juga akan memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk berkontribusi dalam pelayanan publik dan pembangunan negara. Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor publik akan membawa manfaat luas, termasuk diversifikasi tenaga kerja, peningkatan inovasi, dan penciptaan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Todaro, Michael, and Stephen Smith. Economic Development, Pearson Education, Limited, 2020. ProQuest Ebook Central.
- Democracy Unchained : How to Rebuild Government for the People, edited by David Orr, et al., New Press, The, 2020. ProQuest Ebook Central.
- Rodas JM. MAINSTREAMING DISABILITY STUDIES? Victorian Literature and Culture. 2006;34(1):371-384. doi:10.1017/S1060150306051217
- Miller, C., & Albert, B. (2005). Mainstreaming disability in development: Lessons from gender mainstreaming. Disability Knowledge and Research.
- Bibbings, S. M. (2011). The politics of mainstreaming in critical perspective. Cambridge Scholars Publishing.

Jurnal

- Maftuchatur Rohmah, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN. *Journal of Public Policy and Management Review*. 2020;12(3):421-438. doi: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39846>
- Nurul Saadah Andriani. KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*. 2016;9(1):189-214. Accessed March 4, 2024. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/2056/1758>
- Fatimatul Zahroh Anhari, Toha Maksun, Taim Taim, Bayu Umara, Bambang Tri Cahyono. Implementasi Sila ke 5 Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak dan Perlindungan Hukum dalam Bekerja Untuk Menunjang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi: *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*. 2021;1(1):261-274. Accessed March 7, 2024. <https://www.journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas/article/view/365>
- Muhammad, M. Syafi'ie. Pemenuhan Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. 2023;1(2):30-43. Accessed February 21, 2024. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/30981>
- Fardan Kristiandy. Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas : Situasi, Kondisi, Permasalahan Dan Solusi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan

- Sekitar Dan Lembaga Pemasyarakatan. 2021;4(1):125-134. doi: <https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2188>
- Adinda Dhafa Nona. Kesetaraan Gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender di Lembaga Diklat P4TK TK dan PLB Bandung. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*. 2022;11(1):46-63. doi: <https://doi.org/10.21831/sakp.v11i1.17874>
- Sanjukta Choudhury Kaul, Alam Q, Manjit Singh Sandhu. Why Disability Mainstreaming is Good for Business: A New Narrative. *Journal of Business Ethics*. 2022;177(4):861-873. doi: <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05095-0>
- Marshall, Nina (2012). Digging deeper: the challenge of problematising 'inclusive development' and 'disability mainstreaming'. In Angelique Bletsas & Chris Beasley (eds.), *Engaging with Carol Bacchi: Strategic Interventions and Exchanges*. University of Adelaide Press. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/33181/560097.pdf>
- Choudhury Kaul, Sanjukta; Alam, Quamrul & Sandhu, Manjit Singh (2022). Why Disability Mainstreaming is Good for Business: A New Narrative. *Journal of Business Ethics* 177 (4):861-873.
- Teresa, A., David Newton Simiyu, & Njoroge, M. (2016, June 18). E-Learning and Disability Mainstreaming. Retrieved August 14, 2024, from ResearchGate website: https://www.researchgate.net/publication/315942394_E-Learning_and_Disability_Mainstreaming

Peraturan

- UU No. 8 Tahun 2016. Database Peraturan | JDIH BPK. Published 2016. Accessed February 22, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- UU No. 19 Tahun 2011. Database Peraturan | JDIH BPK. Published 2024. Accessed February 23, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39255>

Skripsi

- Rahman N. Pekerjaan Penyandang Disabilitas, PN Jakpus Dapat Penghargaan dari Kemensos. *Sudutpandangid*. Published February 9, 2024. Accessed February 21, 2024. <https://sudutpandang.id/pekerjaan-penyandang-disabilitas-pn-jakpus-dapat-penghargaan-dari-kemensos/>
- Cubank. Sarana & Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas. *Pn-watansoppeng.go.id*. Published 2016. Accessed February 22, 2024. https://pn-watansoppeng.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=391
- Satriawan N, Setyawan I. Pengalaman Quality Of Work Life pada Pegawai Penyandang Disabilitas Fisik di Perusahaan Retail: Sebuah Studi

Fenomenologi - Undip Repository. *Undipacid*. Published online February 15, 2023. doi: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/12020/1/Novan%20Satriawan_15000118130215_Abstrak.pdf

Nasution, Nasrul Yusuf. Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Sosial Provinsi Riau - Repository Universitas Islam Riau. *Uiracid*. Published online March 9, 2018. doi: <https://repository.uir.ac.id/190/1/bab1.pdf>

Cindy Mutia Annur. Jumlah Pekerja Disabilitas Indonesia Meningkat pada 2022, Didominasi Laki-laki. Katadata.co.id. Published June 22, 2023. Accessed February 29, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/22/jumlah-pekerja-disabilitas-indonesia-meningkat-pada-2022-didominasi-laki-laki>

Sulistianingsih Sulistianingsih. Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Era Society 5.0. ResearchGate. Published November 9, 2023. Accessed February 29, 2024. https://www.researchgate.net/publication/375518275_Keterlibatan_Penyandang_Disabilitas_dalam_Pelayanan_Publik_di_Era_Society_50

Pengarusutamaan Isu Disabilitas dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif - Kemitraan. Kemitraan. Published September 24, 2023. Accessed May 6, 2024. <https://kemitraan.or.id/publication/pengarusutamaan-isu-disabilitas-dalam-pembangunan-ekonomi-inklusif/>

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A